



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 179 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JERRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1519

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



**SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

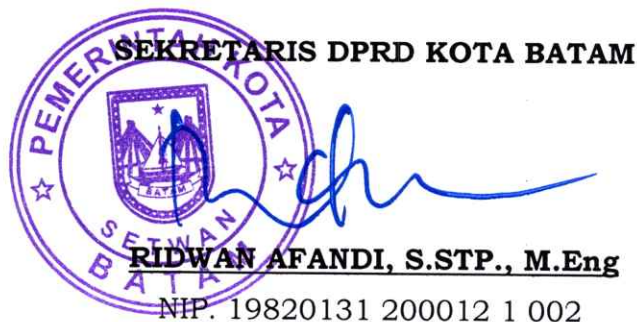
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024.

Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Semoga Perubahan Rencana Kerja 2024 ini dapat dipedomani oleh seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada DPRD Kota Batam guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya dan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Batam pada khususnya.

Batam, Juli 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM



RIDWAN AFANDI, S.STP., M.Eng
NIP. 19820131 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	12
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Sampai Triwulan II.	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam.	34
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam.....	42
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM	46
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam. ..	46
3.2 Perubahan Belanja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024.....	49
3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	61
BAB IV PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II.....	22
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam	36
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam.....	49
Tabel 3.2 Perubahan Belanja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024	51
Tabel 3.3 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja SKPD ... 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan Masyarakat di Tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan OPD final sebelum dokumen Rencana Kerja ditetapkan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai OPD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab dalam rangka membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta struktur organisasi sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi Serta

Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi, maka Sekretariat DPRD dapat melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Batam dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya dan mentargetkan capaian kinerja selanjutnya.

Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut sebagai Renja SKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun. Renja SKPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tata Cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

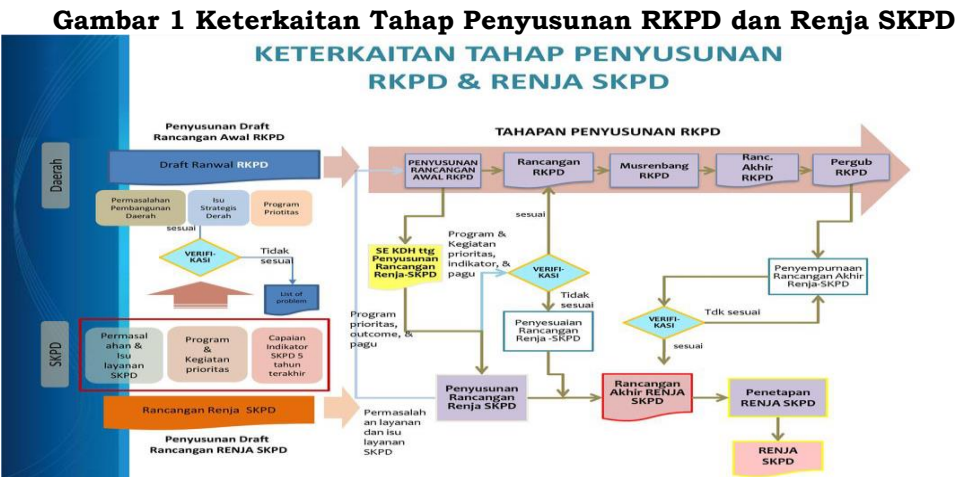
berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Tahap perumusan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Tahap penyajian Renja Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan Musrembang tingkat Kelurahan/Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrembang tingkat Kota merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
4. Penetapan Renja Perangkat Daerah, penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sekretariat DPRD Kota Batam mengikuti poin-poin penting yang terdapat pada RKPD Kota Batam. Penetapan Prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkesinambungan serta berkelanjutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja OPD memiliki keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2024 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, maupun usulan OPD terkait melalui forum OPD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Batam. Maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Renja Sekretariat DPRD Kota Batam memiliki tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-5 (Lima) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusul program atau kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024;
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Wali Kota Batam Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Tahun 2024. Berikut maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja:

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan maksud yakni:

1. Memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien;
2. Mempermudah pengendalian Kegiatan serta Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dalam pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait di Lingkup Pemerintah Kota Batam terutama dalam hal monitoring, evaluasi serta hasil pelaporan pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan;
3. Acuan resmi bagi Pemerintah Kota Batam khususnya di Sekretariat DPRD Kota Batam dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran

Sementara (PPAS) bagi Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2024;

4. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 yakni:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Batam dengan Walikota Kota Batam yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;
2. Agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024;
5. Sebagai bahan evaluasi berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Sampai Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam

- 3.2. Perubahan Belanja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024
- 3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Sampai Triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam sampai dengan Triwulan II (Januari s/d Juni 2024) dengan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 14 (Empat belas) kegiatan dan (50) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Penyerapan anggaran pada Triwulan II dari pagu anggaran sebesar Rp. 122.910.933.363,- dengan realisasi anggaran sekitar Rp 53.548.286.015 atau sekitar 40,51% masih tersisa Rp. 69.362.647.348,- ;

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.692.248.217,-. Pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 6.631.585.440,- atau sekitar 52,25%. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan diantaranya:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pagu anggaran sebesar Rp. 12.692.248.217,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 6.631.585.440,- atau sekitar 52,25%;
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 302.190.000,-. Sudah terealisasi sekitar Rp. 196.925.248,- atau sekitar 65.17%. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, pagu anggaran sebesar Rp. 228.480.000,- sudah terealisasi sekitar Rp. 178.560.000,- atau sekitar 78,15%;

- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, pagu anggaran sebesar Rp. 73.710.000,- sudah terealisasi di Triwulan II sekitar Rp. 18.365.248,- atau sekitar 24,92%.
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu anggaran Rp. 2.812.2023.101,- pada triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 940.923.781,- atau sekitar 33,46%. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan diantaranya:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pagu anggaran sebesar Rp. 140.294.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 32.819.000,- atau sekitar 23.39%;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran sebesar Rp. 799.843.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 196.869.100,- atau sekitar 24,61%;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, pagu anggaran sebesar Rp. 95.750.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 48.929.500,- atau sekitar 38,44%;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu anggaran sebesar Rp. 638.337.600,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 211.256.800,- atau sekitar 33,09%;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pagu anggaran sebesar Rp. 399.636.501,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 101.310.500,- atau sekitar 25,35%;
 - f. Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, pagu anggaran sebesar Rp. 261.600.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 93.229.000,- atau sekitar 35,64%;

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu anggaran sebesar Rp. 476.742.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 268.630.381,- atau sekitar 56,35%.
- 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pagu anggaran Rp. 1.113.513.223,- pada triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 711.837.223,- atau sekitar 63,93%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan diantaranya:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, pagu anggaran sebesar Rp. 436.968.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 52.475.000,- atau sekitar 12,01%;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu anggaran sebesar Rp. 676.545.223,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 659.362.223,- atau sekitar 97,46%.
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran Rp. 8.756.851.036,- pada triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 3.985.481.575,- atau sekitar 45,51%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu anggaran sebesar Rp. 2.021.720.400,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 750.180.686,- atau sekitar 37,11%;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran sebesar Rp. 434.150.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 103.572.000,- atau sekitar 23,86%;

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pagu anggaran sebesar Rp. 6.300.980.636,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 3.131.728.889,- atau sekitar 49,70%.
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.624.678.691,-. Sudah terealisasi sekitar Rp. 1.740.847.780,- atau sekitar 48,03%. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu anggaran sebesar Rp. 1.019.932.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 266.050.900,- atau sekitar 26,09%;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu anggaran sebesar Rp. 634.165.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 206.613.000,- atau sekitar 32,58%;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pagu anggaran sebesar Rp. 1.970.581.691,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 1.268.183.880,- atau sekitar 64,36%.
- 7. Sub Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 33.786.709.932,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 14.800.291.508,- atau sekitar 43,81%;
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 32.282.061.932,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 14.697.063.508,- atau sekitar 45,53%;

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 1.329.648.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 100.160.000,- atau sekitar 7,53%;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- sudah terealisasi di Triwulan II sebesar Rp. 3.068.000 atau sekitar 1,75%.
8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.095.373.000,-. Sudah terealisasi sekitar Rp. 91.378.000,- atau sekitar 8,34%. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 107.712.000,- Sudah terealisasi sekitar Rp. 2.048.000,- atau sekitar 1,90%;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 987.661.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 89.330.000,- atau sekitar 9,04%.
9. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.604.060.000,-. Sudah terealisasi sekitar Rp. 1.701.947.884,- atau sekitar 36,97%. Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 2.175.095.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 1.244.752.519,- atau sekitar 57,23%;
 - b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 2.152.283.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 446.503.365,- atau sekitar 20,75%;

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Naskah Akademik, pagu anggaran sebesar Rp. 243.152.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 10.692.000,- atau sekitar 4,40%;
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 33.530.000,- sampai dengan triwulan II sub kegiatan tersebut belum dilaksanakan.
10. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.827.239.000,-. Sudah terealisasi sekitar Rp. 1.801.601.848,- atau sekitar 23,02%. Pada kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
- a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, pagu anggaran sebesar Rp. 1.132.251.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 98.878.100,- atau sekitar 8,73%;
 - b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pagu anggaran sebesar Rp. 1.099.124.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 28.556.878,- atau sekitar 2,60%;
 - c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD, pagu anggaran sebesar Rp. 1.421.758.000,- Sub Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II belum dilaksanakan, akan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2024;
 - d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan, pagu anggaran sebesar Rp. 1.169.580.000,- Sub Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II belum dilaksanakan, akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2024;

- e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester, pagu anggaran sebesar Rp. 1.498.423.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 685.938.810,- atau sekitar 45,78%;
 - f. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, pagu anggaran sebesar Rp. 1.506.103.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 988.228.060,- atau sekitar 65,61%.
11. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.2570.569.000,-. Sudah terealisasi sekitar Rp. 775.581.383,- atau sekitar 34,35%. Pada kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
- a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, pagu anggaran sebesar Rp. 352.374.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 18.276.000,- atau sekitar 5,19%;
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, pagu anggaran sebesar Rp. 222.930.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 23.580.000,- atau sekitar 10,58%;
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, pagu anggaran sebesar Rp. 352.374.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 27.396.000,- atau sekitar 7,77%;
 - d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, pagu anggaran sebesar Rp. 352.374.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 60.676.000,- atau sekitar 17,22%;
 - e. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, pagu anggaran sebesar Rp. 134.214.000,-

sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 11.600.000,- atau sekitar 8,64%;

- f. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 843.303.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 634.053.383,- atau sekitar 75,19%.

12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.286.659.351,-. Sudah terealisasi sekitar Rp. 9.350.826.546,- atau sekitar 54,09%. Pada kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 1.228.318.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 525.546.964,- atau sekitar 42,79%;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, pagu anggaran sebesar Rp. 1.990.234.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 833.641.550,- atau sekitar 41,89%;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, pagu anggaran sebesar Rp. 551.021.092,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 203.797.500,- atau sekitar 36,99%;
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, pagu anggaran sebesar Rp. 618.600.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 41.000.000,- atau sekitar 6,63%;
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 7.346.466.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 5.824.760.532,- atau sekitar 79,30%;
- f. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 5.553.020.259,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 1.922.080.000,- atau sekitar 34,61%.

13. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.013.800.000,-. Sudah terealisasi sekitar Rp. 62.398.000,- atau sekitar 0,78%. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 101.330.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 55.398.000,- atau sekitar 54,67%;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, pagu anggaran sebesar Rp. 7.912.470.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 7.000.000,- atau sekitar 0,09%.

14. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.737.838.812,-. Sudah terealisasi sekitar Rp. 10.756.659.799,- atau sekitar 57,41%. Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 6.076.423.500,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 4.508.551.808,- atau sekitar 74,20%;
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 294.287.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 161.407.328,- atau sekitar 54,85%;
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, pagu anggaran sebesar Rp. 5.114.316.312,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 2.886.559.505,- atau sekitar 56,44%;
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, pagu anggaran sebesar Rp. 7.252.812.000,- sudah terealisasi di triwulan II sebesar Rp. 3.200.141.158,- atau sekitar 44,12%;

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam yang mengacu pada sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1		SEKRETARIAT DPRD																					
		SEKRETARIAT DPRD																					
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	94	370.550.252.868,00	Persentase	45,84	60.782.975.556,00	Persentase	92	63.027.586.843,00	92	66.674.585.156,00	90	12.139.355.569,00	45,84	29.099.270.555,00	45,84	41.238.626.124,00	41,21%	65,43%	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	97	122.258.436.219,00	Persentase	96	9.232.193.567,00	Persentase	94	10.686.789.239,00	94	13.396.999.658,00	18,05	2.009.047.601,00	52,25	6.631.585.440,00	41,36	8.640.633.041,00	75,00%	80,85%	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	76 Orang/bulan	121.701.363.936,00	Orang	139,59	9.135.753.567,00	Orang/Bulan	86	10.584.909.239,00	87	13.396.999.658,00	70	2.009.047.601,00	70	6.631.585.440,00	70	8.640.633.041,00	100,00%	81,63%	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	15 Dokumen	557.072.283,00	Orang	118,52	96.440.000,00	Dokumen	13	101.880.000,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00%	0,00%	

	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	95	2.875.931.890,00	Persentase	0	161.426.624,00	Persentase	94	701.959.512,00	94	345.420.000,00	0	0,00	65,17	196.925.248,00	29,06	196.925.248,00	0,00%	28,05%	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	242 Paket	1.611.231.330,00	Paket	0	0,00	Orang	238	365.587.512,00	238	271.710.000,00	0	0,00	78,15	178.560.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	136 Orang	1.264.700.560,00	Orang	130	161.426.624,00	Orang	132	336.372.000,00	132	73.710.000,00	0	0,00	24,92	18.365.248,00	0	18.365.248,00	0,00%	5,46%	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	90	19.738.779.438,00	Persentase	89	2.403.305.714,00	Persentase	85	2.885.224.200,00	85	3.724.191.551,00	4,74	133.278.025,00	33,46	940.923.781,00	16,01	1.074.201.806,00	53,83%	37,23%	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	1.502.762.434,00	Paket	1	130.628.500,00	Paket	1	170.591.000,00	1	140.294.000,00	0	0,00	0	32.819.000,00	2	32.819.000,00	100,00%	19,24%	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6 paket	3.872.546.185,00	Paket	3	628.259.500,00	Paket	4	821.513.000,00	4	799.843.000,00	0	0,00	1	196.869.100,00	1	196.869.100,00	33,33%	23,96%	

	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8 paket	837.734.367,00	Paket	5	81.280.000,00	Paket	6	136.122.000,00	6	616.122.450,00	0	0,00	2	36.809.000,00	1	36.809.000,00	20,00%	27,04%	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9 paket	3.515.237.778,00	Paket	6	494.571.000,00	Paket	7	644.297.000,00	7	653.337.600,00	2	15.850.000,00	3	211.256.800,00	1	227.106.800,00	16,67%	35,25%	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 paket	3.463.747.356,00	Paket	1	431.421.200,00	Paket	1	446.676.200,00	1	399.636.501,00	0	0,00	5	101.310.500,00	2	101.310.500,00	100,00%	22,68%	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2 Dokumen	2.530.770.449,00	Dokumen	2	226.240.000,00	Dokumen	2	260.400.000,00	2	261.600.000,00	1	13.765.000,00	1	93.229.000,00	1	106.994.000,00	100,00%	41,09%	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200 Laporan	4.015.980.869,00	Laporan	190	410.905.514,00	Laporan	195	405.625.000,00	195	853.358.000,00	42	103.663.025,00	85	268.630.381,00	13	372.293.406,00	6,84%	91,78%	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
			Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Persentase	85	6.651.903.400,00	Persentase	93	3.689.597.500,00	Persentase	84	1.537.917.916,00	84	2.454.213.223,00	0	0,00	63,93	711.837.223,00	107,31	711.837.223,00	70,83%	46,29%	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7 unit	534.773.567,00	Paket	3	569.250.000,00	Unit	5	603.175.000,00	5	1.357.948.000,00	0	0,00	2	52.475.000,00	2	52.475.000,00	66,67%	8,70%	

	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9 unit	6.117.129.833,00	Unit	4	3.120.347.500,00	Unit	5	934.742.916,00	5	1.096.265.223,00	0	0,00	4	659.362.223,00	3	659.362.223,00	75,00%	70,54%	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	98	39.572.395.926,00	Persentase	90	8.467.339.090,00	Persentase	98	9.395.721.740,00	98	8.315.837.963,00	20,24	1.772.522.409,00	45,51	3.985.481.575,00	17,0675	5.758.003.984,00	40,26%	61,28%	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	8 Laporan	11.189.345.634,00	Laporan	5	1.499.367.746,00	Laporan	6	1.992.680.400,00	6	2.021.720.400,00	1	381.615.401,00	3	750.180.686,00	2	1.131.796.087,00	40,00%	56,80%	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	1.331.746.571,00	Laporan	12	74.750.000,00	Laporan	12	127.060.000,00	12	534.150.000,00	0	0,00	6	103.572.000,00	6	103.572.000,00	50,00%	81,51%	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13 Laporan	27.051.303.721,00	Laporan	13	6.893.221.344,00	Laporan	13	7.275.981.340,00	13	5.759.967.563,00	2	1.390.907.008,00	7	3.131.728.889,00	4	4.522.635.897,00	30,77%	62,16%	
	4.02.01.2.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase	95	13.818.378.202,00	Persentase	52	4.399.765.835,00	Persentase	93	3.351.775.938,00	93	3.555.839.829,00	27,69	1.003.568.680,00	48,03	1.740.847.780,00	14,38	2.744.416.460,00	23,06%	81,88%	
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28 unit	5.867.800.744,00	Unit	21	842.740.500,00	Unit	26	1.040.882.000,00	26	1.019.932.000,00	3	112.176.800,00	4	266.050.900,00	4	378.227.700,00	16,67%	36,34%	

	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	53 unit	3.551.740.691,00	Unit	50	550.491.000,00	Unit	51	612.692.600,00	51	634.165.000,00	0	0,00	11	206.613.000,00	1	206.613.000,00	12,50%	33,72%	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 unit	4.398.836.767,00	Unit	5	3.006.534.335,00	Unit	6	1.698.201.338,00	6	1.901.742.829,00	4	891.391.880,00	3	1.268.183.880,00	2	2.159.575.760,00	40,00%	100,00%	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																					
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase	95	157.139.823.605,00	Persentase	91	32.161.989.226,00	Persentase	93	33.526.372.298,00	93	33.786.709.932,00	21,14	7.142.638.854,00	43,81	14.800.291.508,00	17,92	21.942.930.362,00	50,00%	65,45%	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																					
			Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	50 Orang/bln	153.158.201.505,00	Orang/bulan	50	31.137.473.226,00	Orang/Bulan	50	32.634.398.298,00	50	32.282.061.932,00	50	7.142.638.854,00	50	14.697.063.508,00	50	21.839.702.362,00	100,00%	66,92%	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5 paket	2.957.999.778,00	Paket	2	953.866.000,00	Paket	3	716.974.000,00	3	1.329.648.000,00	0	0,00	1	100.160.000,00	1	100.160.000,00	50,00%	13,97%	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50 Orang	1.023.622.322,00	Orang	25	70.650.000,00	Orang	50	175.000.000,00	50	175.000.000,00	0	0,00	0	3.068.000,00		3.068.000,00	0,00%	1,75%	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD																					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	Persentase	85	8.494.604.188,00	Persentase	28	267.358.000,00	Persentase	82	941.826.000,00	82	1.095.373.000,00	7,15	78.300.000,00	8,34	91.378.000,00	9,48	169.678.000,00	16,67%	18,02%	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																					
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12 Laporan	3.443.972.452,00	Laporan	12	6.208.000,00	Laporan	12	107.712.000,00	12	107.712.000,00	0	0,00	0	2.048.000,00	0	2.048.000,00	0,00%	1,90%	

	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																					
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	9 Laporan	5.050.631.736,00	Laporan	3	261.150.000,00	Laporan	5	834.114.000,00	5	987.661.000,00	1	78.300.000,00	1	89.330.000,00	1	167.630.000,00	33,33%	20,10%	
	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																					
			Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Persentase	84	82.897.337.966,00	Persentase	80	11.584.527.905,00	Persentase	80	13.130.569.468,00	80	17.069.335.000,00	65,7	1.100.159.625,00	50,8	3.503.549.732,00	50,8	4.603.709.357,00	17,61%	35,06%	
			Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang dilaksanakan	Persentase	84	360.008.065.006,00	Persentase	94	55.884.413.004,00	Persentase	80	45.291.663.336,00	80	56.338.514.852,00	15,27	7.067.148.942,00	50,8	20.945.465.728,00	50,8	28.012.614.670,00	38,01%	61,85%	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																					
			Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	Persentase	95	37.242.543.336,00	Persentase	76	5.034.877.743,00	Persentase	93	6.168.607.968,00	93	7.798.399.000,00	9,71	446.951.939,00	36,97	1.701.947.884,00	34,17	2.148.899.823,00	17,92%	34,84%	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah																					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	18 Dokumen	10.957.877.555,00	Dokumen	15	2.235.072.452,00	Dokumen	16	2.039.064.000,00	16	3.057.493.000,00	1	339.666.002,00	4	1.244.752.519,00	4	1.584.418.521,00	26,67%	77,70%	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	16 Dokumen	21.326.631.699,00	Dokumen	12	2.527.407.291,00	Dokumen	14	3.364.236.500,00	14	3.773.092.000,00	4	103.721.937,00	3	446.503.365,00	3	550.225.302,00	25,00%	16,36%	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																					
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4 Dokumen	2.001.163.279,00	Dokumen	0	0,00	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	

4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik																					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	8 Dokumen	1.571.364.492,00	Dokumen	5	272.398.000,00	dokumen	6	492.180.000,00	6	294.500.000,00	1	3.564.000,00	1	10.692.000,00	1	14.256.000,00	20,00%	2,90%	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																					
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	26 Dokumen	1.385.506.311,00	Dokumen	0	0,00	Dokumen	22	273.127.468,00	22	673.314.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	Sub-Kegiatan Belum di Realisasi
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran																					
		Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	Persentase	88	45.654.794.630,00	Persentase	83	6.549.650.162,00	Persentase	85	6.961.961.500,00	85	9.270.936.000,00	8,35	653.207.686,00	23,02	1.801.601.848,00	29,24	2.454.809.534,00	17,30%	35,26%	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	26 Dokumen	6.694.612.265,00	Dokumen	20	678.139.706,00	Dokumen	22	1.110.882.000,00	22	1.132.251.000,00	5	60.960.000,00	0	98.878.100,00	0	159.838.100,00	0,00%	14,39%	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	26 Dokumen	6.290.714.614,00	Dokumen	20	634.783.358,00	Dokumen	22	1.058.092.000,00	22	1.099.124.000,00	0	0,00	0	28.556.878,00	0	28.556.878,00	0,00%	2,70%	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	30 Dokumen	8.206.468.022,00	Dokumen	24	987.146.153,00	Dokumen	26	1.106.935.500,00	26	2.283.942.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	Sub-Kegiatan Belum di Realisasi

	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	30 Dokumen	7.534.166.243,00	Dokumen	24	869.669.581,00	Dokumen	26	974.808.000,00	26	1.169.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	Sub-Kegiatan Belum di Realisasi
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	42 Dokumen	8.623.975.932,00	Dokumen	36	2.204.152.509,00	Dokumen	38	1.386.697.500,00	38	2.154.548.000,00	9	592.247.686,00	10	685.938.810,00	3	1.278.186.496,00	8,33%	92,17%	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	28 Dokumen	8.304.857.554,00	Dokumen	22	1.175.758.855,00	Dokumen	24	1.324.546.500,00	24	1.431.491.000,00	0	0,00	6	988.228.060,00	21	988.228.060,00	95,45%	74,61%	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																					
			Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjutkan	Persentase	92	26.459.732.440,00	Persentase	65	1.366.925.118,00	Persentase	90	2.326.665.000,00	90	2.257.569.000,00	0,27	6.016.000,00	34,35	775.581.383,00	30,82	781.597.383,00	31,64%	33,59%	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12 Laporan	4.118.872.015,00	Laporan	10	194.444.000,00	Laporan	12	352.284.000,00	12	352.374.000,00	43	1.504.000,00	50	18.276.000,00	3	19.780.000,00	25,00%	5,61%	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12 Laporan	3.501.109.084,00	Laporan	10	109.460.000,00	Laporan	12	222.840.000,00	12	222.930.000,00	42	940.000,00	50	23.580.000,00	3	24.520.000,00	25,00%	11,00%	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																					
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12 Laporan	4.045.432.395,00	Laporan	8	157.324.000,00	Laporan	12	352.284.000,00	12	352.374.000,00	43	1.504.000,00	50	27.396.000,00	3	28.900.000,00	25,00%	8,20%	

4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																					
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12 Laporan	4.056.433.152,00	Laporan	10	207.564.000,00	Laporan	12	352.284.000,00	12	352.374.000,00	43	1.504.000,00	50	60.676.000,00	3	62.180.000,00	25,00%	17,65%	
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																					
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	12 Laporan	1.080.516.022,00	Laporan	6	59.204.000,00	Laporan	12	134.124.000,00	12	134.214.000,00	42	564.000,00	70	11.600.000,00	1	12.164.000,00	8,33%	9,07%	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	5 Dokumen	1.667.636.066,00	Dokumen	0	0,00	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00%	0,00%	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	15 Laporan	2.167.926.886,00	Dokumen	0	0,00	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																					
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab n Kepala Daerah	Dokumen	30 Dokumen	5.821.806.820,00	Dokumen	27	638.929.118,00	Dokumen	28	912.849.000,00	28	843.303.000,00	0	0,00	20	634.053.383,00	22	634.053.383,00	81,48%	69,46%	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD																					
		Rata-rata tingkat keterlaksanaan Program kerja alat kelengkapan DPRD	Persentase	80	146.501.332.741,00	Persentase	63,6	19.433.501.442,00	95	75	17.904.533.336,00	75	23.382.114.351,00	20,25	3.499.720.082,00	54,09	9.350.826.546,00	21,0125	12.850.546.628,00	53,33%	71,77%	

	4.02.02.2.04.0002	Orientasi DPRD																					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	50 Dokumen	5.669.962.618,00	Dokumen	0	0,00	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	3 Dokumen	14.267.510.710,00	Dokumen	2	2.794.930.666,00	Dokumen	3	1.411.166.562,00	3	2.111.345.000,00	7	87.076.700,00	9	525.546.964,00	1	612.623.664,00	50,00%	43,41%	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																					
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	28 Orang	10.115.214.115,00	Orang	23	1.745.254.500,00	Orang	25	1.990.234.000,00	25	1.990.234.000,00	23	397.717.250,00	25	833.641.550,00	23	1.231.358.800,00	100,00%	61,87%	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																					
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	9 Orang	3.714.529.910,00	Orang	9	534.234.200,00	Orang	9	546.161.200,00	9	551.021.092,00	9	97.182.300,00	9	203.797.500,00	9	300.979.800,00	100,00%	55,11%	
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	157 Dokumen	10.857.709.533,00	Dokumen	150	437.810.000,00	Dokumen	150	921.070.000,00	150	635.250.000,00	0	0,00	15	41.000.000,00	15	41.000.000,00	10,00%	4,45%	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																					
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	20 Dokumen	76.224.481.875,00	Dokumen	15	9.612.372.076,00	Dokumen	16	7.494.466.000,00	16	11.780.244.000,00	39	2.880.243.832,00	4	5.824.760.532,00	4	8.705.004.364,00	26,67%	100,00%	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																					
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	94 Dokumen	25.651.923.980,00	Dokumen	90	4.308.900.000,00	Dokumen	91	5.541.435.574,00	91	6.314.020.259,00	68	37.500.000,00	22	1.922.080.000,00	30	1.959.580.000,00	33,33%	35,36%	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																					
			Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	75	77.988.478.358,00	Persentase	97	11.577.778.000,00	Persentase	70	8.570.969.500,00	70	4.057.565.000,00	0,09	7.000.000,00	0,78	62.398.000,00	60,27	69.398.000,00	47,44%	0,81%	

	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	25 Laporan	3.001.744.919	Laporan	0	0,00	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																					
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	52 Dokumen	1.046.305.311	Dokumen	52	82.753.000,00	Dokumen	52	102.649.500,00	52	101.330.000,00	0	0,00	32	55.398.000,00	32	55.398.000,00	61,54%	53,97%	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																					
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3 Dokumen	73.940.428.128	Dokumen	3	11.495.025.000,00	Dokumen	3	8.468.320.000,00	3	3.956.235.000,00	9	7.000.000,00	9	7.000.000,00	1	14.000.000,00	33,33%	0,17%	
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah																					
			Persentase Rekomendasi hasil Pembahasan kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti			2.834.981.312	Persentase	0	0,00	Persentase	65	0,00	65	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																					
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	4 Dokumen	1.167.345.246	Dokumen	0	0,00	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																					
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	5 Dokumen	1.667.636.066	Dokumen	0	0,00	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	

	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD																					
			Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang Terpenuhi	Persentase	90	106.223.540.155,00	Persentase	95	23.506.208.444,00	Persentase	87	16.489.495.500,00	87	26.641.266.501,00	18,97	3.554.412.860,00	58,01	10.756.659.799,00	58,01	14.311.072.659,00	19,65%	86,79%	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	27 Dokumen	57.937.233.273	Dokumen	24	10.384.949.731,00	Dokumen	25	7.011.806.500,00	25	10.811.726.500,00	27	1.672.404.982,00	2	4.508.551.808,00	2	6.180.956.790,00	8,33%	88,15%	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																					
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	3 Laporan	1.806.013.760	Laporan	3	309.065.432,00	Laporan	3	216.981.000,00	3	377.763.000,00	23	69.123.728,00	1	161.407.328,00	1	230.531.056,00	33,33%	100,00%	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																					
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12 Dokumen	10.721.301.919	Dokumen	12	4.294.275.157,00	Dokumen	12	3.505.287.000,00	12	5.857.287.001,00	18	957.456.355,00	3	2.886.559.505,00	3	3.844.015.860,00	25,00%	100,00%	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																					
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	114 Dokumen	35.758.991.203	Dokumen	109	8.517.918.124,00	Dokumen	110	5.755.421.000,00	110	9.594.490.000,00	11	855.427.795,00	13	3.200.141.158,00	13	4.055.568.953,00	11,93%	70,47%	
Total												121.449.819.647,00		140.082.435.008,00		20.306.664.136,00		53.548.286.015,00		73.854.950.151,00			
																					32,28%	60,81%	
																					Sedang	Sangat Tinggi	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam

Analisa Kinerja terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam melalui program dan kegiatan yang di anggarkan, antara lain:

1. Masih belum maksimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Bagian;
2. Masih minimnya jumlah sumber daya aparatur yang terampil, berkualitas dan ahli serta yang memiliki inovasi guna menciptakan terobosan-terobosan;
3. Masih diperlukannya peningkatan partisipasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
4. Masih diperlukannya peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka diupayakan agar:

1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tuntutan tantangan dimasa yang akan datang;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur yang terampil sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar tercipta terobosan baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dengan pola top down menjadi bottom up;
3. Meningkatkan partisipasi dan koordniasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
4. Meningkatkan penyusunan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan secara cermat dengan pertimbangan adanya kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan dari berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan pada tahun

berjalan serta mengoptimalisasikan pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme manajemen Sekretariat DPRD Kota Batam yang pro aktif memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			70 org/bln	86 org/bln	72 org/bln	74 org/bln	95%	84%	72 org/bln	222 org/bln	
2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dok	12 dok	13 dok	14 dok	85%	88%	13 dok	-	
3	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	235 paket	238 paket	240 paket	-	-	238 paket	240 paket	
4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	132 org	132 org	134 org	-	88%	132 org	134 org	
5	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	95%	77%	1 paket	1 paket	
6	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			3 paket	3 paket	4 paket	5 paket	98%	97%	4 paket	5 paket	
7	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			5 paket	5 paket	6 paket	7 paket	91%	60%	6 paket	7 paket	
8	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			6 paket	6 paket	7 paket	8 paket	92%	77%	7 paket	8 paket	
9	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	58%	97%	1 paket	1 paket	

10	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	96%	80%	2 dok	2 dok	
11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190 lap	190 lap	195 lap	196 lap	96%	68%	195 lap	196 lap	
12	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			3 unit	3 unit	5 unit	6 unit	92%	94%	5 unit	6 unit	
13	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			4 unit	4 unit	5 unit	8 unit	98%	91%	5 unit	8 unit	
14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			5 lap	5 lap	6 lap	7 lap	75%	69%	6 lap	7 lap	
15	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	75%	44%	12 lap	12 lap	
16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			13 lap	13 lap	13 lap	-	96%	88%	13 lap	13 lap	
17	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25 unit	25 unit	26 unit	27 unit	70%	68%	26 unit	27 unit	
18	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			50 unit	50 unit	51 unit	52 unit	97%	78%	51 unit	52 unit	
19	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			5 unit	5 unit	6 unit	8 unit	84%	43%	6 unit	8 unit	
20	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			-	50 org/bln	50 org/bln	50 org/bln	-	84%	50 org/bln	50 org/bln	

21	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan			2 paket	2 paket	3 paket	4 paket	80%	66%	3 paket	4 paket	
22	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			50 org	50 org	50 org	50 org	52%	38%	50 org	50 org	
23	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	76%	4%	12 lap	12 lap	
24	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			3 lap	3 lap	5 lap	8 lap	39%	31%	5 lap	8 lap	
25	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			15 dok	15 dok	16 dok	17 dok	90%	80%	16 dok	17 dok	
26	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			12 dok	12 dok	14 dok	15 dok	73%	59%	14 dok	15 dok	
27	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			-	-	2 dok	3 dok	-	-	2 dok	3 dok	
28	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi			5 dok	5 dok	6 dok	7 dok	90%	94%	6 dok	7 dok	
29	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun			20 dok	20 dok	22 dok	24 dok	83%	0%	22 dok	24 dok	
30	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			20 dok	20 dok	22 dok	24 dok	83%	69%	22 dok	24 dok	
31	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			20 dok	20 dok	22 dok	24 dok	98%	59%	22 dok	24 dok	
32	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			24 dok	24 dok	26 dok	28 dok	93%	85%	26 dok	28 dok	

33	Jumlah Dokmen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			24 dok	24 dok	26 dok	28 dok	75%	89%	26 dok	28 dok	
34	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			36 dok	36 dok	38 dok	40 dok	91%	71%	38 dok	40 dok	
35	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			22 dok	22 dok	24 dok	26 dok	87%	81%	24 dok	26 dok	
36	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	72%	55%	12 lap	12 lap	
37	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	74%	48%	12 lap	12 lap	
38	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	70%	41%	12 lap	12 lap	
39	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	74%	55%	12 lap	12 lap	
40	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	40%	43%	12 lap	12 lap	
41	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			-	3 dok	4 dok	5 dok	-	-	4 dok	-	
42	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			-	12 lap	14 lap	15 lap	-	-	14 lap	-	

43	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			27 dok	27 dok	28 dok	29 dok	63%	70%	28 dok	29 dok	
44	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			-	-	50 dok	50 dok	-	-	50 dok	-	
45	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			2 dok	2 dok	3 dok	3 dok	90%	78%	3 dok	3 dok	
46	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			23 org	23 org	25 org	27 org	98%	81%	25 org	27 org	
47	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			9 org	9 org	9 org	9 org	100%	90%	9 org	9 org	
48	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			150 dok	150 dok	150 dok	155 dok	88%	23%	150 dok	155 dok	
49	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			15 dok	15 dok	16 dok	18 dok	99%	99%	16 dok	18 dok	
50	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			90 dok	90 dok	91 dok	93 dok	94%	60%	91 dok	93 dok	
51	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			-	-	22 lap	24 lap	-	-	22 lap	-	
52	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun			52 dok	52 dok	52 dok	52 dok	72%	81%	52 dok	52 dok	
53	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	97%	3 dok	3 dok	

54	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			-	-	3 dok	4 dok	-	-	3 dok	-	
55	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun			-	-	3 dok	4 dok	-	-	3 dok	-	
56	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			24 dok	24 dok	25 dok	26 dok	87%	82%	25 dok	26 dok	
57	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun			3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	88%	67%	3 lap	3 lap	
58	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	87%	83%	12 dok	12 dok	
59	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			109 dok	109 dok	110 dok	112 dok	90%	82%	110 dok	112 dok	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam

Isu-isu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi jumlah pegawai dan sarana atau prasarana kerja dan jumlah anggaran yang ada dapat dimanfaatkan sebagai potensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD;

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana atau prasarana yang belum lengkap dan kurangnya memadai dapat ditingkatkan agar mendukung perkembangan tugas-tugas yang ada di Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Tuntutan Tugas

Dalam pelaksanaan tugas kita dituntut cepat, tepat dan memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan tugas yang dijalankan. Hal ini menjadi tantangan bagi staf Sekretariat DPRD untuk memiliki respon yang baik dan juga dukungan kinerja yang didapatkan agar dalam pelaksanaannya dapat cepat dan tepat;

d. Hubungan Harmonis

Memiliki hubungan harmonis antar masing-masing bagian, sub bagian dan aparatur menjadi salah satu hal yang dibutuhkan guna terciptanya pelayanan yang baik dan prima yang dapat diberikan sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

e. Lingkungan Kerja

Mempunyai lingkungan kerja yang harmonis dan adanya koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah serta adanya dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja yang ada di Sekretariat DPRD Kota Batam;

f. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kepala Daerah telah dirumuskan untuk dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka diupayakan agar:

1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tuntutan tantangan dimasa yang akan datang;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur yang terampil sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar tercipta terobosan baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dengan pola top down menjadi bottom up;
3. Meningkatkan partisipasi dan koordniasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;

4. Meningkatkan penyusunan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan secara cermat dengan pertimbangan adanya kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan dari berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan pada tahun berjalan serta mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme manajemen Sekretariat DPRD Kota Batam yang pro aktif memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam dalam penyelesaian permasalahan, sebagai berikut :

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan;

10. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

Terdapat peluang yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam yang meliputi :

- a. Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi;
- b. Adanya kualitas sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas DPRD;
- d. Mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan terhadap DPRD;
- e. Melaksanakan pelatihan terkait pelayanan publik secara berkala bagi DPRD;
- f. Tersedianya ketatalaksanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.

Selain peluang juga terdapat beberapa tantangan yang ada pada Sekretariat DPRD, antara lain:

- a. Kurangnya pelatihan bagi ASN di Sekretariat DPRD Kota Batam;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana, baik dari segi *software* maupun *hardware* dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD;
- c. Keterbatasan jumlah ASN yang memahami Tupoksi yang dapat mengimbangi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada DPRD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam

Sekretariat DPRD Kota Batam menetapkan tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam".

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkaulitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat. Dari uraian diatas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD.

Tugas Utama: Memberikan fasilitasi terhadap lembaga DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pembentukan peraturan daerah, fungsi pengamatan dan fungsi penganggaran.

Tugas Pendukung: Memberikan dan meningkatkan kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Dalam menunjang kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang terampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas

dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab dalam rangka membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta struktur organisasi sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 dan dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 37 tahun 2021 dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Batam dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam pada 5 (Lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-

hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka ditetapkan tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Batam. Tujuan strategis ditetapkan dengan merumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategis ini merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai, adapun tujuan strategis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan SDM Sekretariat yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta berlandaskan Iman dan Taqwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada DPRD;
- b. Meningkatkan pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Kota Batam;
- c. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan DPRD Kota Batam;
- d. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang baik, bersih, efisien, transparan serta perencanaan yang efektif dan Akuntabel;
- e. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD;
- f. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya Sekretariat DPRD Kota Batam dapat dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran yang dituangkan kedalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024, yaitu:

- a. Tujuan Sekretariat DPRD Kota Batam adalah Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

- Kota Batam. Tujuan Sekretariat DPRD Kota Batam berpedoman dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021.
- b. Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam yang berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam serta Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021. Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam adalah Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Sekretariat DPRD Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Batam		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	65	70	75	82	83	85
2		Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	60	62	65	67	69	70
			Presentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	65%	70%	75%	82%	83%	85%
		Optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam	Indeks Kepuasan DPRD dan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD	65	67	68	70	72	75
			Persentase perda yang disahkan	80%	82%	84%	85%	87%	90%

3.2. Perubahan Belanja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Batam untuk Perubahan Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan

DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut maka pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja Alat-alat kelengkapan DPRD.

Tabel 3.2

Perubahan Belanja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	92%	63.027.586.843	66.674.585.156	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	95%	10.686.789.239	13.396.999.658	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	87 Orang/bulan	10.584.909.239	13.396.999.658	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	0 Dokumen	101.880.000	0	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94%	94%	701.959.512	345.420.000	

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	238 Paket	238 Paket	365.587.512	271.710.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	132 Orang	132 Orang	336.372.000	73.710.000	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	85%	2.885.224.200	3.724.191.551	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	170.591.000	140.294.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	821.513.000	799.843.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Paket	6 Paket	136.122.000	616.122.450	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	644.297.000	653.337.600	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	446.676.200	399.636.501	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	260.400.000	261.600.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195 Laporan	195 Laporan	405.625.000	853.358.000	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	84%	84%	1.537.917.916	2.454.213.223	
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	5 Unit	603.175.000	1.357.948.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	5 Unit	934.742.916	1.096.265.223	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	98%	9.395.721.740	8.315.837.963	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6 Laporan	6 Laporan	1.992.680.400	2.021.720.400	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	127.060.000	534.150.000	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 Laporan	13 Laporan	7.275.981.340	5.759.967.563	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	93%	93%	3.351.775.938	3.555.839.829	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	1.040.882.000	1.019.932.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	51 Unit	51 Unit	612.692.600	634.165.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	1.698.201.338	1.901.742.829	
		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	93%	93%	33.526.372.298	33.786.709.932	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	32.634.398.298	32.282.061.932	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	3 Paket	3 Paket	716.974.000	1.329.648.000	

		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	50 Orang	175.000.000	175.000.000	
		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	83%	82%	941.826.000	1.095.373.000	
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	107.712.000	107.712.000	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	5 Laporan	834.114.000	987.661.000	
2		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80%	80%	13.130.569.468	17.069.335.000	
				2. Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan	80%	80%	45.291.663.336	56.338.514.852	
		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	93%	93%	6.168.607.968	7.798.399.000	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	2.039.064.000	3.057.493.000	

		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	3.364.236.500	3.773.092.000	
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen	492.180.000	294.500.000	
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	22 Dokumen	22 Dokumen	273.127.468	673.314.000	
		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	86%	86%	6.961.961.500	9.270.936.000	
		Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	22 Dokumen	22 Dokumen	1.110.882.000	1.132.251.000	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22 Dokumen	22 Dokumen	1.058.092.000	1.099.124.000	

		Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	26 Dokumen	26 Dokumen	1.106.935.500	2.283.942.000	
		Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokmen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	26 Dokumen	26 Dokumen	974.808.000	1.169.580.000	
		Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	38 Dokumen	38 Dokumen	1.386.697.500	2.154.548.000	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	24 Dokumen	24 Dokumen	1.324.546.500	1.431.491.000	
		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjutkan	92%	92%	2.326.665.000	2.257.569.000	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	352.284.000	352.374.000	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	222.840.000	222.930.000	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	352.284.000	352.374.000	

		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	352.284.000	352.374.000	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	12 Laporan	134.124.000	134.214.000	
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen	912.849.000	843.303.000	
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	75%	75%	17.904.533.336	23.382.114.351	
		Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	
		Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	1.411.166.562	2.111.345.000	

		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	25 Orang	25 Orang	1.990.234.000	1.990.234.000	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang	546.161.200	551.021.092	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	150 Dokumen	150 Dokumen	921.070.000	635.250.000	
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	16 Dokumen	7.494.466.000	11.780.244.000	
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	91 Dokumen	91 Dokumen	5.541.435.574	6.314.020.259	
		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	70%	70%	8.570.969.500	4.057.565.000	
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0 Laporan	0 Laporan	0	0	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	52 Dokumen	52 Dokumen	102.649.500	101.330.000	
		Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	8.468.320.000	3.956.235.000	
		Kegiatan Kerja Sama Daerah	Kegiatan Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi hasil Pembahasan kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti	65%	65%	0	0	

		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	
		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	87%	87%	16.489.495.500	26.641.266.501	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	25 Dokumen	7.011.806.500	10.811.726.500	
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	216.981.000	377.763.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	3.505.287.000	5.857.287.001	
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	110 Dokumen	110 Dokumen	5.755.421.000	9.594.490.000	
TOTAL							121.449.819.647	140.082.435.008	

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan program tersebut, Sekretariat DPRD Kota Batam pada tahun 2024 menetapkan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM UTAMA

I. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas kegiatan:

1. Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah;
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;
- d. Penyusunan Tata Tertib.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

- a. Pembahasan KUA dan PPAS;
- b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- c. Pembahasan APBD;
- d. Pembahasan APBD Perubahan;
- e. Pembahasan Laporan Semester;
- f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;

- e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
 - f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 4. Peningkatan Kapasitas DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:**
- a. Pendalaman Tugas DPRD;
 - b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - e. Penyusunan Program Kerja DPRD;
 - f. Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
- 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:**
- a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - b. Pelaksanaan Reses.
- 6. Fasilitasi Tugas DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:**
- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

PROGRAM PENDUKUNG

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan:

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:**
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:**
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

- a. Pengadaan Mebel;
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
- c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

d. Layanan Administrasi DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

- a. Fasilitasi Fraksi DPRD;
- b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
					Capaiam Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target							
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4					URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4	02				SEKRETARIAT DPRD																		121.449.819.647	140.082.435.008			148.750.499.749
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																		63.027.586.843	66.674.585.156			67.934.367.256
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		10.686.789.239	13.396.999.658			9.573.536.143
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	86 Orang/bulan	87 Orang/bulan	95%	95%	10.584.909.239	13.396.999.658	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	9.474.835.797						
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	13 Dokumen	0 Dokumen	95%	95%	101.880.000	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	98.700.346						
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		701.959.512	345.420.000			751.653.383
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	238 Paket	238 Paket	94%	94%	365.587.512	271.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	432.077.691						
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	132 Orang	132 Orang	94%	94%	336.372.000	73.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	319.575.692						

4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										2.885.224.200	3.724.191.551					4.320.118.619		
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	1 Paket	1 Paket	85%	85%	170.591.000	140.294.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	433.622.132
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	4 Paket	4 Paket	85%	85%	821.513.000	799.843.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	751.940.211
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	6 Paket	6 Paket	85%	85%	136.122.000	616.122.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	205.770.644
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	7 Paket	7 Paket	85%	85%	644.297.000	653.337.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	743.954.274
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	1 Paket	1 Paket	85%	85%	446.676.200	399.636.501	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	724.625.629
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	2 Dokumen	2 Dokumen	85%	85%	260.400.000	261.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	577.358.659
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	195 Laporan	195 Laporan	85%	85%	405.625.000	853.358.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	882.847.070

4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1.537.917.916	2.454.213.223					1.148.480.248		
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	5 Unit	5 Unit	84%	84%	603.175.000	1.357.948.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	99.245.318
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	5 Unit	5 Unit	84%	84%	934.742.916	1.096.265.223	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	1.049.234.930
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										9.395.721.740	8.315.837.963					7.859.658.475		
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	6 Laporan	6 Laporan	98%	98%	1.992.680.400	2.021.720.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	2.121.054.213
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	12 Laporan	12 Laporan	98%	98%	127.060.000	534.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	385.300.519
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	13 Laporan	13 Laporan	98%	98%	7.275.981.340	5.759.967.563	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	5.353.303.743
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.351.775.938	3.555.839.829					2.951.414.595		
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	26 Unit	26 Unit	92%	92%	1.040.882.000	1.019.932.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	1.230.122.958
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	51 Unit	51 Unit	92%	92%	612.692.600	634.165.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	790.149.737

4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	6 Unit	6 Unit	92%	92%	1.698.201.338	1.901.742.829	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	931.141.900
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											33.526.372.298	33.786.709.932				39.438.917.130	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92%	92%	50 Orang/Bula	50 Orang/Bula	92%	92%	32.634.398.298	32.282.061.932	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	38.616.851.855
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Yang disediakan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	3 Paket	3 Paket	92%	92%	716.974.000	1.329.648.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	625.607.775
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	50 Orang	50 Orang	92%	92%	175.000.000	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	196.457.500
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD											941.826.000	1.095.373.000				1.890.588.663	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	12 Laporan	12 Laporan	92%	92%	107.712.000	107.712.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	770.799.615
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92%	92%	5 Laporan	5 Laporan	92%	92%	834.114.000	987.661.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhiya Administrai Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92%	1.119.789.048

4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										58.422.232.804	73.407.849.852					80.816.132.493	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										6.168.607.968	7.798.399.000					7.001.489.396	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	16 Dokumen	16 Dokumen	93%	93%	2.039.064.000	3.057.493.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.910.486.537
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	14 Dokumen	14 Dokumen	93%	93%	3.364.236.500	3.773.092.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	3.844.927.567
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	0 Dokumen	0 Dokumen	93%	93%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	666.451.698
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	6 Dokumen	6 Dokumen	93%	93%	492.180.000	294.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	296.417.722
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	22 Dokumen	22 Dokumen	93%	93%	273.127.468	673.314.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	283.205.872

4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran											6.961.961.500	9.270.936.000					8.756.099.541	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	22 Dokumen	22 Dokumen	86%	86%	1.110.882.000	1.132.251.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.277.961.672
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	22 Dokumen	22 Dokumen	86%	86%	1.058.092.000	1.099.124.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.225.268.114
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	26 Dokumen	26 Dokumen	86%	86%	1.106.935.500	2.283.942.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.270.773.991
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	26 Dokumen	26 Dokumen	86%	86%	974.808.000	1.169.580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.352.328.796

4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	38 Dokumen	38 Dokumen	86%	86%	1.386.697.500	2.154.548.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.964.653.508
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	24 Dokumen	24 Dokumen	86%	86%	1.324.546.500	1.431.491.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.665.113.460
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										2.326.665.000	2.257.569.000			5.132.365.250		
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	12 Laporan	12 Laporan	92%	92%	352.284.000	352.374.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	671.598.593
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	12 Laporan	12 Laporan	92%	92%	222.840.000	222.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	565.444.745

4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	12 Laporan	12 Laporan	92%	92%	352.284.000	352.374.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	668.685.044
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	12 Laporan	12 Laporan	92%	92%	352.284.000	352.374.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	666.499.882
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	12 Laporan	12 Laporan	92%	92%	134.124.000	134.214.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	145.344.784
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	0 Dokumen	0 Dokumen	92%	92%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	555.376.415
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	0 Dokumen	0 Dokumen	92%	92%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	721.989.339
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	28 Dokumen	28 Dokumen	92%	92%	912.849.000	843.303.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.137.426.448

4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										17.904.533.336,00	23.382.114.351,00					26.304.617.533,00	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	0 Dokumen	0 Dokumen	75% 75%		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.888.279.808
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	3 Dokumen	3 Dokumen	75% 75%		1.411.166.562	2.111.345.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	2.066.856.045
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	25 Orang	25 Orang	75% 75%		1.990.234.000	1.990.234.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	1.823.513.145
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	9 Orang	9 Orang	75% 75%		546.161.200	551.021.092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	592.915.417
4	02	02	04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	150 Dokumen	150 Dokumen	75% 75%		921.070.000	635.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	966.092.924
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	16 Dokumen	16 Dokumen	75% 75%		7.494.466.000	11.780.244.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	13.218.789.511

4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Penyerbarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu		80% 80%	80% 80%	91 Dokumen	91 Dokumen	75%	75%	5.541.435.574	6.314.020.259	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	5.748.170.683
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										8.570.969.500,00	4.057.565.000,00				14.736.723.912,00		
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	0 Laporan	0 Laporan	70%	70%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	999.677.546
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	52 Dokumen	52 Dokumen	70%	70%	102.649.500	101.330.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	145.097.087
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	3 Dokumen	3 Dokumen	70%	70%	8.468.320.000	3.956.235.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	13.591.949.279
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah										0,00	0,00				944.139.905,00		
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	0 Dokumen	0 Dokumen	65%	65%	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	388.763.490

4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	0 Dokumen	0 Dokumen	65%	65%	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	555.376.415
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD											16.489.495.500,00	26.641.266.501,00				17.940.696.956,00
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	25 Dokumen	25 Dokumen	85%	85%	7.011.806.500	10.811.726.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	9.603.751.658
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80% 80%	80% 80%	3 Laporan	3 Laporan	85%	85%	216.981.000	377.763.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	333.225.849
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80% 80%	80% 80%	12 Dokumen	12 Dokumen	85%	85%	3.505.287.000	5.857.287.001	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	999.677.546
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang di laksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80% 80%	80% 80%	110 Dokumen	110 Dokumen	85%	85%	5.755.421.000	9.594.490.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang di laksanakan	80% 80%	7.004.041.903

BAB IV

PENUTUP

Dalam Pencapaian keberhasilan mewujudkan Visi Sekretariat DPRD “Terwujudnya Sekretariat DPRD Kota Batam yang professional dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD melalui pemerintahan yang baik” serta untuk mewujudkan Visi Kota Batam “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan sejahtera” maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama serta meningkatkan etos kerja yang lebih baik yang tercermin dalam kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Strategi dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026. Renja Sekretariat DPRD Merupakan dasar atau acuan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pimpinan dan Staf Sekretariat DPRD Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tindak Lanjut dari Renja Sekretariat DPRD Kota Batam adalah dokumen Akhir yang dijadikan acuan dalam pembuatan dokumen Renja. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai arah dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di masa yang akan datang. Ditetapkannya Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2023 dengan ini diharapkan Kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam dapat berjalan dengan baik. Perumusan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kota Batam dapat berhasil dengan baik apabila didukung dengan

Dana yang diajukan serta komitmen melalui komunikasi secara *Top Down* maupun *Bottom Up Approach*. Dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan telah dilalui dengan berbagai proses dalam merespon aspirasi masyarakat. Dengan demikian sangat diharapkan agar Program-program kegiatan tersebut dapat terealisasi dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

WALI KOTA BATAM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Rudi', with a long horizontal stroke extending to the right.

MUHAMMAD RUDI